

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Janauri 2026 3,34 % (Y-on-Y), 0,65, % (M-to-M)

Februari 2026 3,42 % (Y-on-Y), 0,45 % (M-to-M)

Maret 2026 2,40 % (Y-on-Y), 0,25 % (M-to-M)

- Pada Janauri 2026 inflasi *year-on-year* (y-on-y) di NTT pada Januari 2026 tercatat sebesar **3,34%**. Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk NTT tercatat pada angka 109,65 Inflasi tertinggi di NTT tercatat di Waingapu sebesar **4,77**, didorong oleh kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
- Pada Februari 2026 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,42 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,14. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 4,64 persen dengan IHK sebesar 112,29 dan Inflasi terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,96 persen dengan IHK sebesar 110,51. **Kelompok utama pemicu** kenaikan harga yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta jasa.
- Pada Maret 2026 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,40 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,41. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 2,88 persen dengan IHK sebesar 112,33 dan Inflasi terendah terjadi di Kabupaten Ngada sebesar 1,51 persen dengan IHK sebesar 109,13 yang dapat dilihat sebagai berikut
- Risiko ke Depan (Triwulan II-2026):
 1. *Volatile Foods*: Gangguan cuaca atau musim tanam dapat memicu lonjakan harga pangan pokok (beras, bawang, cabai).
 2. Transportasi: Kenaikan harga tiket pesawat yang berpotensi menjadi penyumbang inflasi utama di NTT sebagai wilayah kepulauan

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kendala yang dihadapi
 - Produktivitas pertanian yang belum optimal
 - Ketergantungan Provinsi NTT terhadap pasokan beras dari luar dapat terlihat melalui konsumsi beras Provinsi NTT sebesar 149,49 ribu Ton/Triwulan.
2. Klasifikasi permasalahan:
3. Ketersediaan pasokan:
 - Pola Inflasi NTT

Beras:

Sebagian besar pasokan beras di Provinsi NTT masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Sulsel, NTB, Jatim dan Impor.

Ikan-Ikanan:

Konsumsi ikan di NTT cukup tinggi sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi secara keseluruhan.

Hortikultura:

Komoditas hortikultura seperti tomat, cabai, dan bawang, memberi andil inflasi.

Daging Ayam:

Komoditas Daging ayam dan Telur ayam turut memberi andil deflasi.

1. Keterjangkauan harga:

- Harga komoditas yang fluktuatif sering kali menjadi faktor utama pemicu terjadinya deflasi/inflasi di NTT, sebagian besar berasal dari kelompok *Volatile Foods*, antara lain Harga beras, daging dan telur ayam ras, bawang merah dan putih, cabai merah dan rawit, ikan kembung dan tongkol. Komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga memiliki bobot yang besar terhadap perhitungan inflasi.
- Produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) di NTT yang rendah di bawah nasional sehingga sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari luar daerah.
- Tarif Angkutan Udara dipengaruhi oleh kondisi geografis NTT yang terdiri dari kepulauan membuat penerbangan menjadi moda transportasi utama intra provinsi NTT dan maskapai yang beroperasi masih terbatas dan cenderung didominasi oleh satu maskapai.

1. Kelancaran distribusi :

- Pemetaan menggunakan *Global Neighboring Area* untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan berbeda terhadap inflasi NTT. Wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua memiliki dampak langsung terhadap inflasi di NTT. Sementara itu, wilayah lainnya memiliki dampak tidak langsung melalui perantara atau faktor lain.

1. Komunikasi efektif :

Adanya koordinasi dari berbagai *stakeholder* terkait tentang pentingnya pengendalian inflasi secara kontinyu namun perlu dioptimalkan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri secara *hybrid* setiap minggu.
- Januari - Maret 2026 (Triwulan I) TPID Provinsi NTT melakukan pengambilan data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional di Kota Kupang
- 9 Februari 2026 TPID Provinsi NTT melaksanakan Rapat *High Level Meeting (HLM)* di Provinsi NTT Lokasi Hotel Herper Kupang, menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) bulan suci Ramadhan, Idul Fitri
- 9 - 10 Februari 2026 TPID Provinsi NTT melaksanakan Capacity Building tingkat Provinsi NTT, lokasi Hotel Herper Kupang
- 13 Maret 2026 TPID Provinsi NTT bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melaksanakan sidak ke Pasar, Outlet LPG, Gudang Bulog, Terminal Peti Kemas, Bandar El Tari Kupang.
- 10 April 2026 TPID Provinsi NTT bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melaksanakan sidak ke Pasar, SPU Pertamina, Outlet LPG, Pasar Modern/Supermarket.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota se NTT kurun waktu Januari 2026 s/d Maret 2026 sudah sesuai (*On The Track*) sehingga tercatat perkembangan inflasi YoY Provinsi NTT ke arah yang lebih baik yaitu :

Janauri 2026 3,34 % (Y-on-Y), 0,65, % (M-to-M)

Februari 2026 3,42 % (Y-on-Y), 0,45 % (M-to-M)

Maret 2026 2,40 % (Y-on-Y), 0,25 % (M-to-M)

Sehingga kegiatan-kegiatan seperti Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Bersubsidi dan Non Subsidi tersebut tetap dan akan dilaksanakan pada waktu - waktu selanjutnya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

A. JANGKA PENDEK : MENGHADAPI *COMBO FESTIVE SEASON* 2026

1. K-1 Keterjangkau Harga:

- Pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) bersama satu minggu sebelum perayaan HBKN utamanya Idul Fitri, Nyepi dan Paskah, oleh Dinas Perindustrian dan Perdaga Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bank Indonesia, dan BULOG.
- Intensifikasi sidak pasar oleh Satgas Pangan Provinsi NTT, satu minggu sebelum HBKN untuk menindak apabila terjadi lonjakan harga.

2. K-2 Ketersediaan Pasokan:

- Penguatan pengawasan pasokan di gudang menjelang HBKN untuk mencegah penimbunan pasokan.
- Melakukan aktivasi KAD B2B, menindaklanjuti Kerjasama Regional Bali NTB NTT hingga ke level PKS antar Pelaku Usaha.
- Mitigasi risiko gagal panen pada musim hujan.

3. K-3 Kelancaran Distribusi:

- Pengawasan bongkar muat dan distribusi pasokan dari oleh pengelola pintu-pintu masuk barang (Pelabuhan oleh Pelindo dan Bandara oleh Angkasa Pura).
- Pelaksanaan subsidi distribusi untuk komoditas yang mengalami inflasi.

4. K-4 Komunikasi Efektif:

- Menggiatkan himbauan belanja bijak untuk mengarahkan masyarakat agar belanja cukup pada momen HBKN.

A. JANGKA MENENGAH - PANJANG : PENGUATAN PRODUKTIVITAS DAN DISTRIBUSI PROVINSI NTT

1. K-1 Keterjangkauan Harga:

- Menghubungkan pelani/UMKM dengan gerai-gerai NTT Mart dalam rangka penyediaan pangan dengan harga sesuai HET, dan meningkatkan daya beli

petani/UMKM.

2. K-2 Ketersediaan Pasokan:

- Sinergi pengembangan SDM dan Komoditas Local Champion, melalui peningkatan produktivitas, dukungan sarpras, dan implementasi teknologi digital.
- Perluasan pemanfaatan rantal dingin (cold storage) untuk meningkatkan umur pasokan pangan.
- Perluasan Gerakan Tanam Cabal, Sayur, dan Hortikultura lain sebagai rangkaian dari OVOP, OSOP, dan OCOP.
- Perluasan Program Demotani NTT, untuk peningkatan tahan sawah dan produktivitas beras.

3. K-3 Kelancaran Distribusi:

- Penambahan rute dan jadwal distribusi moda transportasi barang via laut dari/menuju Provinsi NTT.
- Koordinasi dengan BUMN untuk pelayanan transportasi antar pulau di NTT, agar ada *standard published rate*.
- Meningkatkan *granularitas* data perdagangan antar wilayah dengan sinergi percepatan implementasi Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW).

4. K-4 Komunikasi Efektif:

- Penyusunan *dashboard* Interaktif neraca pangan Provinsi NTT disinergikan dengan monitoring.

Kupang, 13 Mei 2026

KEPALA BIRO

PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SETDA PROVINSI NTT,

Selfi H. Nange, S.Sos., M.Si., M.Pub, Pol

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197606091995032001